



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA (DPPAKB)  
KOTA BATAM TAHUN 2022**

# KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (RENJA) ini ditetapkan sebagai proyeksi dini dan arah pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 yang berpedoman kepada matriks RENSTRA 2021-2026 terkait rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun berjalan. Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 bermanfaat bagi pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam.

Batam, Agustus 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Batam



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
------------------------	----------

<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
--------------------------------	----------

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7

<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 .....</b>	<b>9</b>
---	----------

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	58

<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>59</b>
---	-----------

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	59
3.2. Visi dan Misi Kota Batam.....	65
3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	66
3.3. Program dan Kegiatan.....	68

<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>93</b>
--	-----------

<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
-----------------------------	------------

### Lampiran

#### **SK Tim Renja Tahun 2022**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Pendudukan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJMD.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan dari semangat Otonomi Daerah, serta mengacu kepada UUD 1945 pasal 27 tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga Negara tidak ada kecualinya, Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, kemudian adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (PTPPO), Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga dimana dari latar belakang undang-undang sebagaimana disebutkan diatas bahwa diamanatkan disetiap daerah diwajibkan untuk melaksanakan amanat tersebut sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan, oleh karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai lembaga organisasi pemerintahan sangat diperlukan, dan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam telah diberikan mandat dan wewenang untuk membuat program kebijakan dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Batam.

Selain beberapa hal yang telah diuraikan diatas maka latar belakang dibuatnya renja adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan dan bernegara secara terus menerus yang berkesinambungan, dan dalam melaksanakan otonomi daerah perlu dilaksanakan beberapa hal; **pertama** memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender melalui kebijakan nasional secara optimal dan memadai sesuai tuntutan umum dari masyarakat agar aparat pemerintah memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. **Kedua** pelayanan prima harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum terutama untuk meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan serta Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sejahtera, maka kedudukan peran perempuan perlu mendapat perhatian, ditingkatkan terus dan dikedepankan terutama di tingkat Kabupaten/Kota karena perempuan merupakan salah satu unsur komponen dari bagian masyarakat yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan, Rendahnya pendidikan yang dimiliki kaum perempuan di bidang kesehatan dan kesehatan reproduksi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pemerintahan maupun legislatif hal ini selanjutnya akan berdampak kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi acuan pelaksanaan RENJA ini adalah :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
  - 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana
  - 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan Nasional
  - 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Di Daerah Batam
  - 9) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - 10) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batam
  - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 14) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
  - 15) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.
  - 16) Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
  - 17) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
  - 18) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
  - 20) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
  - 21) Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



- 22) Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 23) Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022
- 24) Perwako Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022
- 25) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
- 26) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah :

- a. Sinkronisasi antara RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Renja dengan mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
- b. Tersedianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.

- c. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur dan pedoman kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun dokumen perencanaan.
- e. Untuk mensinergikan antara kebijakan dan program yang ada didalam Renstra dengan renja yang disusun setiap tahunnya, dan sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 – 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan ini berisikan Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum juga bagaimana Sistematika Penulisan Renja ini.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD.**

Pada bab II ini diuraikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab III ini berisikan tentang Tujuan, sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

### BAB IV PROGRAM KEGIATAN

Pada bab IV ini diuraikan tentang Program, kegiatan, Indikator kinerja, adanya tujuan dan kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

### BAB V PENUTUP

Lampiran

SK Tim Renja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2021**

**2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat  
Daerah**

Sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi. Tolok ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga
- b. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

Kedua sasaran yang ingin dicapai tersebut pada Tahun 2021 mempedomani Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah dituangkan melalui 10 program, 20

Kegiatan dan 34 sub kegiatan mendasar yang secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan berorientasi pada ketercapaian sasaran dimaksud. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Rencana Kinerja dan sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021 digambarkan capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021 dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2021.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3APPKB Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA

### DP3APPKB

Tabel T-C.29.

#### Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2021 Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>Urusan Pemerintahan</b>										
<b>1.02. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>										
<b>1.02.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										
<b>1.02.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
1.02.01.01.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran selama 1 tahun	100	100	100	100	100	100		
1.02.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
1.02.02.01.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	100	100	100	100	100	100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.02.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	100	-	-	-	-	100		
<b>1.02.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,</b>										
1.02.02.15	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>									
1.02.02.15.01.	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	peningkatan wawasan kader dan pengurus PKK Kota Batam	77 TIM PKK	77 TIM PKK	77 TIM PKK	77 TIM PKK	100	77 TIM PKK		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.15.02.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan pelatihan perempuan berkepribadian dan Hebat Politik	3 ORGANISASI WANITA	3 ORGANISASI WANITA	3 ORGANISASI WANITA	4 ORGANISASI WANITA	133%	3 ORGANISASI WANITA		
1.02.02.15.03.	Kegiatan Peningkatan Peranan Stakeholder Dalam Kelembagaan PUG	Jumlah OPD yang mendapatkan Pelatihan anggaran yang responsif gender	44 OPD (11.30%)	15 OPD(11.30%)	15 OPD(8.5%)	15 OPD(16.10%)	100%	44 OPD ( 11.30%)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.15.04.	Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan	Jumlah Perempuan yang diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan taraf hidup keluarga	750	250	300	590	196%	700		
1.02.02.15.06.	Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Data Gender dan Anak	Persentase Pembaharuan Data Gender dan Anak Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.02.02.16.	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.16.01.	Kegiatan Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Pengaduan atau Laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.02.02.16.07.	Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Kota/Kecamatan/Kelurahan Layak Anak (KLA) Kota Batam	Capaian Skor Kota Layak Anak	780	700	700	920	131.40 %	770		
<b>1.02.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>										
1.02.08.15	<b>Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
•										
1.02.08.15.03.	Kegiatan Penyuluhan dan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah PUS di Kota Batam yang mengikuti Program KB	1000	1000	1000	993	99.30%	1000		
1.02.08.15.09.	Kegiatan Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	12 Balai Penyuluhan KB	100%	12 Balai Penyuluhan KB	12 Balai Penyuluhan KB	100	12 Balai Penyuluhan KB		
1.02.08.15.12.	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	12 Kecamatan	100%	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100	12 Kecamatan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penggerakan Kampung KB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana/DAK NON FISIK)	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	13 Kampung KB	13 Kampung KB	13 Kampung KB	13 Kampung KB	100%	13 Kampung KB		
	Pembinaan Program KKBPK, Distribusi Alkon dan Manajemen BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana/DAK NON FISIK)	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	128 orang	128 orang	128 orang	128 orang	100%	128 orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.08.15.	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Kelompok Ketahanan Keluarga, UPPKS dan PIK Remaja	Jumlah anggota kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	288 kel	327 Kel	268 Kel	355 kel	132.4%	278 kel		
1.02.08.15.	Kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	Jumlah tenaga lini lapangan yang didayagunakan	408 Orang	332 Orang	332 Orang	332 Orang	100	402 Orang		

## **2.2. Penjelasan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 masih terpengaruh dengan kondisi pandemic yang masih berlangsung sampai saat ini. Terutama kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik yang realisasi anggarannya berpedoman kepada pentunjuk teknis dari pusat. Demikian halnya pelaksanaan kegiatan yang menghimpun dan melibatkan orang banyak terkendala PPKM di masa pandemic sehingga berpengaruh pada capaian dan realisasi pelaksanaan kegiatan secara umumnya. Berikut ini gambaran pelaksanaan kegiatan Tahun 2021.

### **2.2.1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Melalui Program Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan kualitas hidup, dan potensi perempuan untuk mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Batam. Dalam capaian program ini diwujudkan langkah-langkah progresif untuk memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan perempuan untuk melangsungkan kehidupan yang berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya dan sosial yang mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga secara umumnya.

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan melalui 77 Tim Penggerak PKK yang dibentuk dalam upaya pencapaian Keluarga harmonis dan sejahtera. Sepanjang Tahun 2021 kegiatan ini telah terlaksana dengan baik. Pembinaan akhlak mulia bagi kader dan pengurus PKK sebanyak 5000 orang di 12 Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan moral dan spiritual perempuan dalam keluarga. Kegiatan ini dipandang perlu untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan sesama dalam upaya mencapai keselarasan hidup bermasyarakat dalam keberagaman. Demikian halnya melalui kegiatan ini juga telah terlaksana HKG PKK yang melibatkan 500 orang kader PKK se-Kota Batam dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan melalui Pelatihan Kuliner bagi 590 orang perempuan Kota Batam yang memberikan semangat dan motivasi dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga sehingga mampu berkontribusi dan berperan aktif dalam membangun ekonomi kota Batam. Dengan metode ini perempuan Kota Batam khususnya ibu rumah tangga ekonomi lemah dapat memiliki daya cipta dan menghasilkan produk yang bernilai jual di pasaran sehingga meningkatkan taraf hidup keluarga yang berperan dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan Kota Batam. Capaian



Realisasi Keuangan kegiatan ini 92.67% dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar 98%.

### **2.2.2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Melalui program ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan kualitas hidup perempuan yang berhaluan pada kesetaraan gender dan peningkatan akses publik bagi kaum perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Perempuan diberikan pembekalan dalam upaya peningkatan kompetensi dan wawasan pembangunan yang turut andil setara dengan kaum laki-laki. Sasaran kegiatan ini pada akhirnya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kota Batam yang pada tahun 2021 di proyeksikan pada angka IPG 94.54 dan IDG 61.05. dan pencapaian IPG Kota Batam pada tahun 2021 sebesar 94.43 sedangkan IDG Kota Batam sebesar 59.10. Program ini dituangkan dalam 2 kegiatan yaitu :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota

Melalui Kegiatan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota

Batam mengupayakan penerapan kesetaraan gender di Kota Batam. Tujuan kegiatan ini agar setiap kegiatan/program OPD memuat atau merumuskan cakupan-cakupan keselarasan gender dalam kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD. Melalui kegiatan ini terlaksana pelatihan PPRG(GAB/GBS) bagi 50 orang perencana se-kota Batam. Dan capaian Anggaran Responsif Gender tercapai pada angka 16.10 % dari total belanja langsung APBD kota Batam. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 94.54% dan capaian fisik sebesar 100%.

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan
  - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Melalui kegiatan ini telah terlaksana pelatihan Tata Rias bagi 550 orang Ibu rumah tangga yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi dan keterampilan kaum perempuan yang mendukung peningkatan ekonomi keluarga sejahtera. Demikian halnya terlaksana Talkshor bagi 170 orang perempuan bersamaan dengan peringatan Hari Kartini dengan tujuan untuk meningkatkan semangat perjuangan kaum perempuan dalam menggali potensi dan sumberdaya di berbagai bidang pembangunan berbangsa dan bermasyarakat. Capaian fisik kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 98.42%. Hal ini dikarenakan karena

kondisi pandemic yang masih membatasi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang banyak

### **2.2.3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini dilaksanakan dalam upaya penyediaan basis data gender dan anak yang mengakomodir pelaksanaan Anggaran Responsif Gender GAB/GBS dalam pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Batam. Dan dilaksanakan melalui kegiatan

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021 Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan anggaran yang terealisasi sebesar 100 % dan capaian fisik kegiatan sebesar 100%. Muatan kegiatan ini mengakomodir Pelatihan dan Penginputan Data PPRG OPD dalam Penggunaan Aplikasi E-SIPUGA. Pelatihan dan Penginputan Data PPRG Kecamatan dalam Penggunaan Aplikasi E-SIPUGA yang diharapkan memberikan pemahaman perangkat daerah dalam merencanakan penganggaran yang berporos pengarusutamaan gender.

#### **2.2.4. Program Perlindungan Perempuan**

##### 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

###### a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak, maka dipandang sangat perlu untuk memberikan pemahaman tentang Perda perlindungan Perempuan dan Anak ini kepada masyarakat luas. Sering sekali perempuan dan anak menjadi target dan korban kekerasan yang tak jarang meninggalkan trauma fisik dan psikologis jangka panjang yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas generasi bangsa yang produktif. Maka melalui kegiatan ini Dinas pemberdayaan Perempuan berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat baik melalui sosialisasi dan penyuluhan agar hak-hak anak dan perempuan dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Dalam Pelaksanaan Kegiatan ini juga melibatkan tim P2TP2A dan Tim KPPAD yang sudah terbentuk dan berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Secara garis besar kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dalam pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Sampai dengan akhir 2021 terdapat 40 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 96 kasus kekerasan anak yang sudah ditangani. Realisasi kegiatan ini telah mengakomodir pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Anak Kota Batam (3x), Pembekalan Satgas Kelurahan Bebas Kekerasan dan Rapat Koordinasi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu

*Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023*

Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Capaian realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 97.48% dan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **2.2.5. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021 diakomodir dari belanja Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) yang secara umum pelaksanaannya sesuai dengan juknis dari kementerian.

Program ini dituangkan dalam 2 kegiatan utama di bawah ini :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Sampai dengan akhir tahun 2021 kekerasan terhadap anak mencapai 96 kasus. Ini adalah angka yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan layanan khusus dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan pada anak. Alokasi anggaran kegiatan ini terealisasi sebesar 35.97% dengan realisasi fisik sebesar 80%. Sejumlah persoalan tidak terserapnya anggaran ini secara maksimal karena penanganan kasus kekerasan tidak sampai kepada proses medis maupun penanganan medicolegal yang dimuat dalam kerangka anggaran belanja kegiatan ini.

#### **2.2.6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan hak-hak anak dalam proses tumbuh kembang baik di bidang pendidikan, sosial dan budaya. Melalui Kegiatan ini tahun 2021 telah terbentuk Forum Anak Kecamatan sebanyak 3 Kecamatan (Batu Aji,

Sekupang, Sagulung). Demikian halnya KPPAD Kota Batam sebagai komisi pengawas yang menjadi salah satu substansi kegiatan ini turut berperan aktif dalam mengkampanyekan hak-hak anak dan program-peningkatan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Kota Batam. Kegiatan ini juga mengakomodir Honorarium KPPAD Kota Batam dan pelaksanaan Penilaian Kota Layak Anak yang pada tahun 2021 mencapai 920 Skor dan meraih peringkat Madya. Capaian realisasi fisik dari kegiatan ini sampai mencapai 100% dengan alokasi anggaran sebesar 99.46%.

#### **2.2.7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam mencetuskan Program Pembinaan Keluarga Berencana sebagai salah satu program yang terus akan diwujudkan sesuai dengan yang termaktub dalam RPJMD. Dalam capaian program ini diwujudkan langkah-langkah progresif untuk menekan angka kelahiran penduduk, melaksanakan penyuluhan Keluarga Berencana, dan memberikan pemikiran cerdas terhadap generasi muda Kota Batam tentang bahaya seks bebas, PMS dan HIV/AIDS dan penggunaan obat-obat terlarang(narkoba). Sebagian besar kegiatan dalam program ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat. Program ini dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Realisasi Keuangan 46.82 % dan capaian fisik 80 % melalui pelaksanaan Pelayanan KB Gratis dan penyuluhan KB di kecamatan dan kelurahan Kota Batam. Kegiatan ini sedikit terkendala karena perilaku masyarakat yang cenderung enggan melakukan tindakan layanan medis termasuk pemasangan alat kontrasepsi langsung dimasa pandemic dan kurangnya tenaga layanan medis KB di lapangan karena adanya program vaksinasi yang intens sepanjang tahun 2021.

Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera sebagai pilar utama pembangunan kota Batam. Capaian CPR Kota Batam pada tahun 2021 sebesar 78.70 %

b. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

Kegiatan ini mengakomodir media informasi program pembangunan keluarga dan informasi Keluarga Berencana bagi kader KB dan PIK-Remaja Kota Batam.



Realiasi Keuangan sebesar 91.87% dan realisasi fisik sebesar 95%.

c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Kegiatan ini mengakomodir Pembayaran Air, Listrik dan Internet untuk Balai Penyuluhan di 12 kecamatan (bulan Januari s.d Mei), penyuluhan bagi kader berbasis data kependudukan pada 12 kecamatan. Realiasi Keuangan sebesar 73.56% dan realisasi fisik sebesar 85%.

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan ini mengakomodir Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD pada 12 kecamatan. Dan realisasi keuangan sampai akhir tahun 2021 sebesar 68.29 % dengan capaian fisik sebesar 80 %.

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Melalui kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan telah mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke 260 Fasilitas kesehatan KB se-Kota Batam yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah akseptor Aktif KB pada tahun 2021. Realisasi Keuangan sebesar 44.53% dan fisik 75%. Serapan anggaran pada kegiatan ini juga rendah dikarenakan bantuan transportasi bagi tim visitasi dan pembinaan puskesmas ke jejaringnya tidak terlaksana karena pelaksanaan vaksinasi massal sepanjang tahun 2021.

b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Realisasi Keuangan sebesar 67.44 % dan fisik sebesar 75 %

c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Kegiatan ini mengakomodir penyediaan sarana prasarana pelayanan KB di 12 Balai Penyuluhan KB se-Kota Batam yang terdiri dari mebelair, Komputer, Printer, laptop bagi PLKB dan Kader KB di 12 kecamatan Kota Batam.

Obgyn bed, Implant dan IUD removal Kit total sebanyak 95 set yang disalurkan ke 38 orang bidan prkatek mandiri dan klinik KB pemerintah maupun swasta. Peningkatan sarana parasarana Balai Penyuluhan KB di 12 kecamatan dilaksanakan melalui penyaluran mebelair, layar proyektor, Personal kompputer, Laptop,

Printer, Modem Infocus yang turut meningkatkan kualitas layanan KB di kota Batam

Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 83.14 % dan pada pelaksanaan fisik mencapai 100%.

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program keluarga berencana dan pembangunan kependudukan baik melalui lokakarya mini maupun penyuluhan program keluarga berencana. Penggerakan Kampung KB ini merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB yang didukung oleh kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD /sub PPKBD 128 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan.

Realisasi keuangan 65.70 % dan fisik sebesar 90%

**2.2.8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- b. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Realisasi Keuangan 58.62% dan fisik 75 %

Dalam upaya peningkatan taraf hidup keluarga, sampai dengan Tahun 2021 telah terbentuk sebanyak 355 kelompok kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga yang menasar ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan khusus(baik dalam menjahit, memasak, tata rias dan lainnya) yang dapat dikembangkan dan menghasilkan produk-produk yang bernilai jual di kalangan masyarakat kota Batam. Melalui kegiatan ini juga terbentuk kelompok tribina sebagai salah satu indikator pencapaian keluarga sejahtera. Sampai dengan tahun 2021 BKB HI terbentuk 179 kelompok, BKL terbentuk 27 kelompok, dan BKR terbentuk 39 kelompok. Untuk membuka wawasan dan pengetahuan remaja di Kota Batam juga dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada remaja. Kondisi remaja pada masa kini telah memasuki tahap yang memperhatikan. Terbukanya secara luas sistem jaringan internet telah banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja dewasa ini. Remaja cenderung pasif dan kurang kreatif bahkan kerap kali terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengkonsumsi narkoba. Melalui Pembentukan PIK-R di sekolah-sekolah maupun jalur masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Batam dengan gencar

memaparkan program remaja yang berencana untuk meraih masa depan gemilang yang bebas dari narkoba dan sex bebas. Sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk PIK-R sebanyak 66 kelompok yang diharapkan menjadi pioner bagi remaja Kota Batam dalam mewujudkan remaja cerdas berencana dan unggul.

### **2.2.9. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini memuat kebijakan daerah dalam sistem kependudukan dalam pelaksanaan pembangunan kota Batam pada periode 5 tahun RPJMD. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat disusun basis data pembangunan kependudukan yang berhaluan kepada penataan wilayah dan akses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Batam. Program ini diakomodir melalui kegiatan :

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021 telah disusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang diharapkan dapat menjadi haluan perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan. Realisasi keuangan sebesar 75.90% dan realisasi fisik 90%.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Batam

**Tabel 2.2**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				2021	2022	2023	2024	2021	TW II 2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			94,43 %	94,44 %	94,46 %	94,54 %	94,43 %	45,1	94,46 %	94,54 %	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			58,40 %	58,45 %	58,50 %	58,55 %	59,10 %	27,5	58,50 %	58,55 %	
3	Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak			5%	5,5%	6%	6,5%	5%	2,8	6%	6,5%	
4	Angka Kelahiran Total (TFR)			2,38%	2,36%	2,34%	2,32%	2,32%	1,15	2,34%	2,32%	

5	Indeks Pembangunan Keluarga			57,22	57,24	57,26	57,30	57,22 %	27,5	57,26	57,30
---	-----------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	---------	------	-------	-------

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

### Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Masih lemahnya komitmen stakeholder terkait dalam upaya pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis gender
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Rendahnya kualitas hidup perempuan implikasi dari rendahnya kapasitas SDM perempuan kota Batam
4. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam pembangunan
5. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Tingginya minat pencari kerja yang masuk ke Kota Batam meningkatkan jumlah pasangan usia produktif yang rentan terhadap penambahan angka kelahiran penduduk;
7. Luasnya keterbukaan akses informasi dan teknologi yang dilatarbelakangi oleh letak geografis kota Batam

sebagai wilayah border /perbatasan rentan terhadap peningkatan kenakalan remaja yang berdampak kepada perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan usia dini;

8. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam upaya menurunkan angka Keluarga Pra Sejahtera I dan Pra Sejahtera II
9. Terbatasnya jumlah penyuluh KB/petugas lapangan KB sebagai koordinator pelaksanaan program bangga kencana di lapangan.



## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

**TABEL T-C. 31**

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam**

Kode	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan 2023					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
02.0 8.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kota Batam	<b>Persentase Teenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>9.936.152.287,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kota Batam	<b>Persentase Teenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>9.262.774.740,00</b>	
2.08. 01.2. 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang teenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>8.179.304.287,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang teenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>7.994.697.780,00</b>	
2.08. 01.2. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	11 Jenis	8.093.024.287	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	7.950.057.780	
2.08. 01.2. 02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah bahan penatausahaan dan verifikasi SKPD yang dilaksanakan	9 Jenis	86.280.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	44.640.000	

<b>2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>682.000.000,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang teenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>259.515.000,00</b>	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.960.000	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Jenis	120.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.000.000	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Jenis	57.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.997.000	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Tersedianya makanan dan minuman	3 Jenis	52.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.384.000	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	18.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.195.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Batam	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	8 Jenis	425.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	149.979.000	

<b>2.08.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>186.489.000,00</b>	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	7 Jenis	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	186.489.000	
<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>633.710.800,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>647.442.960,00</b>	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Jenis	80.420.400	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.420.400	
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	N/A	N/A	N/A	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	N/A	N/A	N/A	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Jenis	553.290.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	567.022.560	
<b>2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>100%</b>	<b>191.137.200,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>100%</b>	<b>174.630.000,00</b>	

	Daerah		Pemerintahan Daerah yang terlaksana			Daerah		Pemerintahan Daerah yang terlaksana			
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah jasa pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan yang disediakan	2 Jenis	79.060.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79.060.000	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional yang disediakan	3 Jenis	62.077.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	75.350.000	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang disediakan	3 Jenis	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	20.220.000	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	N/A	N/A	N/A	

02.0 8.02	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kota Batam	<b>Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam</b>	<b>11,30 %</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kota Batam	<b>Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam</b>	<b>11,30 %</b>	<b>70.000.000,00</b>	
2 08 02 2.01	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase OPD yang dibina dan berhasil</b>	<b>70%</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase OPD yang dibina dan berhasil</b>	<b>70%</b>	<b>70.000.000,00</b>	
2 08 02 2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah OPD yang mendapatkan Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender	44 OPD	260.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	70.000.000	
02.0 8.02	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kota Batam	<b>Persentase perempuan yang dibina dan Berhasil</b>	<b>65%</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kota Batam	<b>Persentase perempuan yang dibina dan Berhasil</b>	<b>65%</b>	<b>1.147.655.000,00</b>	
2.08. 02.2. 02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</b>	Kota Batam	<b>Persentase perempuan yang dibina</b>	<b>70%</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</b>	Kota Batam	<b>Persentase perempuan yang dibina</b>	<b>70%</b>	<b>1.147.655.000,00</b>	

	<b>Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					<b>Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Batam	Jumlah perempuan yang mendapatkan Pembinaan Pelatihan Perempuan Berkepribadian dan Hebat Politik (Seminar Kepribadian, Lomba Hari Ibu, Sarasehan Organisasi)	300 Orang	420.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.147.655.000	
<b>02.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>503.065.000,00</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>410.980.101,00</b>	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	40%	330.000.000,00	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	40%	310.000.100,00	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Kota Batam	Jumlah pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	59 Orang	330.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,	59 Dokumen	310.000.100	

	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		atau laporan yang dilayani oleh unit pelayanan terpadu			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
<b>2.08.03.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>	<b>30%</b>	<b>97.065.000,00</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>	<b>30%</b>	<b>100.980.001,00</b>	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi oleh unit pelayanan terpadu	18 Orang	97.065.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Layanan	100.980.001	
<b>2.08.03.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</b>	<b>40%</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</b>	Kota Batam	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	

	<b>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi oleh unit pelayanan terpadu	59 Orang	76.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	N/A	N/A	N/A	
<b>02.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Kota Batam	<b>Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam</b>	<b>4,25%</b>	<b>1.790.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Kota Batam	<b>Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam</b>	<b>4,25%</b>	<b>1.584.598.750,00</b>	
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif</b>	<b>65%</b>	<b>1.790.000.000,00</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif</b>	<b>65%</b>	<b>1.584.598.750,00</b>	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas	Kota Batam	Jumlah kader dan pengurus PKK yang dibina se-Kota Batam, Jumlah	750 Orang	1.790.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas	Kota Batam	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	2 Laporan	1.584.598.750	



	Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Perempuan yang diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan taraf hidup keluarga			Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
02.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Kota Batam	<b>Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG</b>	<b>70%</b>	<b>170.858.956,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Kota Batam	<b>Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG</b>	<b>70%</b>	<b>74.994.500,00</b>	
2.08.05.2.01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap</b>	<b>70%</b>	<b>170.858.956,00</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap</b>	<b>70%</b>	<b>74.994.500,00</b>	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah OPD yang difasilitasi pembaharuan data gender dan anak	44 OPD	170.858.956	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	74.994.500	

<b>02.0 8.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Kota Batam	<b>Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak</b>	<b>780 Skor</b>	<b>504.277.200,00</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Kota Batam	<b>Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak</b>	<b>780 Skor</b>	<b>420.000.000,00</b>	
<b>2.08. 06.2. 01</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA</b>	<b>66%</b>	<b>504.277.200,00</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA</b>	<b>66%</b>	<b>420.000.000,00</b>	
2.08. 06.2. 01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah lembaga Layanan Anak yang dievaluasi dan diberikan sosialisasi pemenuhan hak anak	40 Lemba ga	504.277.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokum en	420.000.000	
<b>02.0 8.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>277.929.000,00</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>350.094.200,00</b>	
<b>2.08. 07.2. 01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti / yang dilayani)</b>	<b>75%</b>	<b>112.950.000,00</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti / yang dilayani)</b>	<b>75%</b>	<b>112.949.600,00</b>	

2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang dilayani	90	112.950.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Dokumen	112.949.600
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti</b>	<b>65%</b>	<b>164.979.000,00</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti</b>	<b>65%</b>	<b>161.064.000,00</b>
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah korban tindak kekerasan terhadap anak yang difasilitasi oleh unit pelayanan terpadu	59 Orang	164.979.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	59 Layanan	161.064.000
<b>2.08.07.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan</b>	Kota Batam	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>65,00 %</b>	<b>76.080.600,00</b>

	<b>Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	N/A	N/A	N/A	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	59 SDM	76.080.600	
02.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Kota Batam	<b>Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK</b>	<b>40%</b>	<b>237.600.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Kota Batam	<b>Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK</b>	<b>40%</b>	<b>187.600.000,00</b>	
2.14.02.2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian</b>	Kota Batam	<b>Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan</b>	<b>40%</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian</b>	Kota Batam	<b>Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan</b>	<b>40%</b>	<b>70.000.000,00</b>	

	<b>Kuantitas Penduduk</b>					<b>Kuantitas Penduduk</b>					
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah dokumen grand design yang berbasis kependudukan /Jumlah OPD yang menerima rekomendasi implementasi GDPK	1 Dokumen /15 OPD	120.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000	
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>100% / 40%</b>	<b>117.600.000,00</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>100% / 40%</b>	<b>117.600.000,00</b>	
2.14.02.2.02.03	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Batam	Jumlah Balai KB yang dipenuhi sarana/prasarana	12 Balai KB	117.600.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Batam	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	117.600.000	
<b>02.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet</b>	<b>81.0%/ 9.50</b>	<b>4.763.427.200,00</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet</b>	<b>81.0%/ 9.50</b>	<b>4.445.904.800,00</b>	

			Need					Need			
2.14.03.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Kota Batam	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>100% / 40%</b>	<b>1.020.455.000,00</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Kota Batam	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>100% / 40%</b>	<b>838.455.000,00</b>	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	Jumlah PUS yang mengikuti penyuluhan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1000	290.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Loka	4 Dokumen	108.000.000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Batam		N/A	N/A	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Batam		N/A	N/A	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Batam	Jumlah Balai KB yang dipenuhi sarana/prasarana	12 Balai KB	N/A	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Batam		1 Laporan	N/A	

2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	Kota Batam	Jumlah Balai KB yang difasilitasi biaya operasional dipenuhi sarana/prasarana	12 Balai KB	486.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	486.000.000
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPB	Kota Batam	Jumlah peserta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan stunting	350 Orang	244.455.000	Pengendalian Program KKBPB	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPB	1 Laporan	244.455.000
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Kota Batam	<b>Persentase tenaga lini/kader yang aktif</b>	<b>70%</b>	<b>592.215.000,00</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Kota Batam	<b>Persentase tenaga lini/kader yang aktif</b>	<b>70%</b>	<b>452.173.900,00</b>
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang dibina	408 Orang	185.000.000	Pembinaan IMP dan Program KKBPB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	6 Organisasi	44.999.900
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	Jumlah Kader Institusi yang dibina	532 Orang	407.215.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi	532 Orang	407.174.000

								Masyarakat Pedesaan (IMP)			
2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB</b>	<b>82%</b>	<b>2.926.507.200,00</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB</b>	<b>82%</b>	<b>2.931.025.900,00</b>	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	Jumlah Faskes yang difasilitasi penyediaan Alkon dan Obat Kontrasepsi	100	N/A	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	N/A	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	Jumlah PUS yang mendapatkan Pelayanan KB MKJP	575	1.832.457.200	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	575 Orang	1.832.485.900	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	Jumlah Faskes / Balai Penyuluhan KB yang difasilitasi sarana	75	970.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	974.490.000	



			penunjang pelayanan KB nya								
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	Jumlah Faskes yang difasilitasi penyediaan Alkon dan Obat Kontrasepsi	100 Faskes	124.050.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	124.050.000	
<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Kota Batam	<b>Presentase kampung KB yang aktif</b>	<b>70%</b>	<b>224.250.000,00</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Kota Batam	<b>Presentase kampung KB yang aktif</b>	<b>70%</b>	<b>224.250.000,00</b>	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Batam	Jumlah Kampung KB yang difasilitasi	15 Kampung KB	224.250.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Batam	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	13 Kampung KB	224.250.000	

								dan Keluarga Berencana) di Kampung KB			
02.1 4.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Kota Batam	<b>Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif</b>	<b>50%</b>	<b>5.324.420.000,00</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Kota Batam	<b>Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif</b>	<b>50%</b>	<b>5.379.445.000,00</b>	
2.14. 04.2. 01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Kota Batam	<b>Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina</b>	<b>100%</b>	<b>5.324.420.000,00</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Kota Batam	<b>Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina</b>	<b>100%</b>	<b>5.379.445.000,00</b>	
2.14. 04.2. 01.0 2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam		N/A	N/A	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	N/A	N/A	

2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam	Jumlah Anggota Bina Ketahanan Keluarga yang dibina	288	95.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	150.025.000
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam		350 Orang	N/A	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	350 Orang	5.229.420.000
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Kota Batam	Jumlah peserta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan stunting	350 Orang	5.229.420.000	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Kota Batam	N/A	350 Orang	N/A

PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)					PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)					
<b>TOTAL</b>				<b>24.187.729.643,00</b>					<b>23.334.047.091,00</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**TABEL T-C. 32**

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan**

**Tahun 2022**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	cat
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)/ Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KS)	LPM Kelurahan Buliang (Kecamatan Batu Aji) Volume : 60 Orang	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60 Orang	Pelatihan dan Pengembangan Usaha Keluarga Sejahtera

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN**

###### **3.1.1.1. Renstra Kementerian PPPA**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tahun 2020-2024 yang berperdoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan kinerja pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

#### **1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

#### **2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

### **3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

### **4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan

dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)

## **5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

### **3.1.1.2. Renstra BKKBN**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki visi “Mewujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”,



Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2020-2024 diatas, BKKBN memiliki misi: 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif, 3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup, 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global, 5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi, dan edukasi serta 6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM Aparatur.

Adapun tujuan yang ingin di capai selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 yaitu : 1) mewujudkan keluarga berkualitas yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan Bahagia serta 2) mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

Dalam hal ini BKKBN harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas,

kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan bahagia batin. Serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama untuk: a) Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau,

maupun pelayanan KB mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk mengurangi kesenjangan pelayanan KB; b) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi; c) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK - KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga; dan d) Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB. Berdasarkan hal - hal tersebut diatas,

maka telah disusun sasaran strategis BKKBN 2020-2024 yang tertera pada Renstra BKKBN 2020-2024 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)
3. Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi/ Unmeet Need
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/ Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 Tahun
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
6. Meningkatnya Median Usia Perkawinan Pertama (MUKP)

### **3.2. VISI & MISI**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, **Visi Kota Batam** adalah **”Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”** Dan **Misi** yang menjadi acuan penetapan

tujuan Dinas sesuai RPJMD 2021-2026 adalah **“Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia”**

### **3.3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.3.1. TUJUAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam masa lima tahun mendatang sebagai penjabaran dari visi dan misi walikota Batam yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Tujuan ini juga disusun dengan mempedomani permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja lima tahun ke depan. Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batam dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas P3APPKB Kota Batam menetapkan Tujuan :

*“Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri”*

#### **3.3.2. SASARAN**

Sasaran Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis DP3AP2KB telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah disepakati, maka ditetapkan sasaran sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan

program-program Dinas P3APPKB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang akan diperoleh hasil yang lebih baik.

- 1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan kota Batam*
- 2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak*
- 3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk*
- 4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga*

Dengan indikator kinerja utama :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. Persentase Penurunan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
4. Angka Kelahiran Total (TFR)
5. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

### 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 :

**Table T-C. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023, Perkiraan Maju Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (2023 Tahun Rencana)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (2024 Tahun Rencana)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>02.0 8.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Teenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Teenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>9.262.774.740,00</b>			<b>100%</b>	<b>10.105.552.287,00</b>
<b>2.08. 01.2. 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>7.994.697.780,00</b>			<b>100%</b>	<b>8.348.704.287,00</b>

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023

		<b>Daerah yang teenuhi</b>	<b>Daerah yang teenuhi</b>							
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	39 Orang	7.950.057.780	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		39 Orang	8.293.024.287
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	7 Dokumen	44.640.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		7 Dokumen	55.680.000
<b>2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang teenuhi</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>259.515.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>682.000.000,00</b>
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	11.960.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		3 Paket	10.000.000
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	45.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		4 Paket	120.000.000



2.08. 01.2. 06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	19.997.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Paket	57.000.000
2.08. 01.2. 06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	20.384.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		4 Paket	52.000.000
2.08. 01.2. 06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	12.195.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		2 Paket	18.000.000
2.08. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	11 Laporan	149.979.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		11 Laporan	425.000.000
<b>2.08. 01.2. 07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>186.489.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>250.000.000,00</b>
2.08. 01.2. 07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	5 Unit	186.489.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		5 Unit	250.000.000
<b>2.08. 01.2. 08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>647.442.960,00</b>			<b>100%</b>	<b>633.710.800,00</b>

***Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023***

	<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>							
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	80.420.400	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		12 Laporan	80.420.400
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A		N/A	N/A	PENDAP ATAN ASLI DAERAH			N/A
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Laporan	567.022.560	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		4 Laporan	553.290.400
<b>2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>174.630.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>191.137.200,00</b>

2.08. 01.2. 09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	79.060.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		2 Unit	79.060.000
2.08. 01.2. 09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	5 Unit	75.350.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		5 Unit	62.077.200
2.08. 01.2. 09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	60 Unit	20.220.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		60 Unit	50.000.000
2.08. 01.2. 09.0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A		N/A	N/A	PENDAP ATAN ASLI DAERAH			N/A

<b>02.0 8.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam</b>	<b>Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>11,30</b>	<b>70.000.000,00</b>		<b>11.40</b>	<b>260.000.000,00</b>
<b>2 08 02 2.01</b>	<b>Pelebagaan Pangarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/K ota</b>	<b>Persentase OPD yang dibina dan berhasil</b>	<b>Persentase OPD yang dibina dan berhasil</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>70%</b>	<b>70.000.000,00</b>		<b>75%</b>	<b>260.000.000,00</b>
2 08 02 2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	35 Dokumen	70.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH	35 Dokumen	260.000.000
<b>02.0 8.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase perempuan yang dibina dan berhasil</b>	<b>Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>65%</b>	<b>1.147.655.000,00</b>		<b>70%</b>	<b>460.000.000,00</b>

2.08. 02.2. 02	<b>Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat dan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perempuan yang dibina</b>	<b>Persentase perempuan yang dibina</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>65%</b>	<b>1.147.655.000,00</b>			<b>70%</b>	<b>460.000.000,00</b>
2.08. 02.2. 02.0 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Dokumen	1.147.655.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		2 Dokumen	460.000.000
<b>02.0 8.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan</b>	<b>Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>410.980.101,00</b>			<b>100%</b>	<b>457.065.000,00</b>

2.08. 03.2. 01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>40%</b>	<b>310.000.100,00</b>			<b>40%</b>	<b>360.000.000,00</b>
2.08. 03.2. 01.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	59 Dokumen	310.000.100	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		57 Dokumen	360.000.000
2.08. 03.2. 02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>30%</b>	<b>100.980.001,00</b>			<b>30%</b>	<b>97.065.000,00</b>

	<b>Kabupaten/Kota</b>									
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	18 Layanan	100.980.001	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		17 Layanan	97.065.000
2.08.03.2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>			<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

2.08. 03.2. 03.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A		N/A	N/A			N/A	N/A
<b>02.0 8.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam</b>	<b>Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>4,25%</b>	<b>1.584.598.750,00</b>			<b>4,50</b>	<b>1.865.000.000,00</b>
<b>2.08. 04.2. 01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif</b>	<b>Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>65%</b>	<b>1.584.598.750,00</b>			<b>70%</b>	<b>1.865.000.000,00</b>



2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	1.584.598.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2 Laporan	1.865.000.000
02.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG</b>	<b>Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG</b>	Kota Batam	65%	74.994.500,00			70%	185.000.000,00
2,08.05.2.01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap</b>	<b>Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap</b>	Kota Batam	65%	74.994.500,00			70%	185.000.000,00

2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	44 Dokumen	74.994.500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH	44 Dokumen	185.000.000
<b>02.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak</b>	<b>Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>780 Skor</b>	<b>420.000.000,00</b>		<b>800 Skor</b>	<b>574.070.857,00</b>
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	Kota Batam	66%	420.000.000,00		68%	574.070.857,00
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	420.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH	5 Dokumen	574.070.857

<b>02.0 8.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan</b>	<b>Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>350.094.200,00</b>			<b>100%</b>	<b>353.929.000,00</b>
<b>2.08. 07.2. 01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/K ota</b>	<b>Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti / yang dilayani)</b>	<b>Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti / yang dilayani)</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>75%</b>	<b>112.949.600,00</b>			<b>75%</b>	<b>112.950.000,00</b>
2.08. 07.2. 01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	90 Dokumen	112.949.600	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		85 Dokumen	112.950.000
<b>2.08. 07.2. 02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/K ota</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>65%</b>	<b>161.064.000,00</b>			<b>65%</b>	<b>164.979.000,00</b>

2.08. 07.2. 02.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	59 Layanan	161.064.000			55 Layanan	164.979.000
<b>2.08. 07.2. 03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti</b>		<b>65%</b>	<b>76.080.600,00</b>			<b>65%</b>	<b>76.000.000,00</b>

2.08. 07.2. 03.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		59 SDM	76.080.600			59 SDM	76.000.000
02.1 4.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK</b>	<b>Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>30%</b>	<b>187.600.000,00</b>			<b>40%</b>	<b>242.600.000,00</b>
2.14. 02.2. 01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka</b>	<b>Persentase OPD yang telah mengkomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan</b>	<b>Persentase OPD yang telah mengkomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>30%</b>	<b>70.000.000,00</b>			<b>40%</b>	<b>125.000.000,00</b>

	<b>Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>									
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	70.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	125.000.000
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standar pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standar pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>		<b>100%/40 %</b>	<b>117.600.000,00</b>			<b>100%/45%</b>	<b>117.600.000,00</b>
2.14.02.2.02.03	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian		12 Dokumen	117.600.000			12 Dokumen	117.600.000

	Lapangan dan Pelayanan KB	Lapangan dan Pelayanan KB	Lapangan dan Pelayanan KB							
<b>02.1 4.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need</b>	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>81.0%/9. 50</b>	<b>4.445.904.800,00</b>			<b>82.00 / 9.0</b>	<b>5.006.902.200,00</b>
<b>2.14. 03.2. 01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%/40 %</b>	<b>838.455.000,00</b>			<b>100% / 45%</b>	<b>1.055.455.000,00</b>
2.14. 03.2. 01.0 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai	Kota Batam	4 Dokumen	108.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		4 Dokumen	325.000.000

**Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023**

		Kearifan Budaya Loka	Kearifan Budaya Loka							
2.14. 03.2. 01.0 1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				N/A	N/A	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB		N/A	N/A
2.14. 03.2. 01.0 3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK			Kota Batam	1 Laporan	N/A	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB		N/A	N/A
2.14. 03.2. 01.0 7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	1 Laporan	486.000.000	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB		1 Laporan	486.000.000



2.14. 03.2. 01.0 8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		1 Laporan	244.455.000			1 Laporan	244.455.000
<b>2.14. 03.2. 02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Punyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase tenaga lini/kader yang aktif</b>	<b>Persentase tenaga lini/kader yang aktif</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>70%</b>	<b>452.173.900,00</b>			<b>70%</b>	<b>602.215.000,00</b>
2.14. 03.2. 02.0 1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	6 Organisasi	44.999.900			6 Organisasi	195.000.000
2.14. 03.2. 02.0 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	532 Orang	407.174.000			542 Orang	407.215.000

2.14. 03.2. 03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan KB</b>	<b>Presentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan KB</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>82%</b>	<b>2.931.025.900,00</b>			<b>83%</b>	<b>3.124.982.200,00</b>
2.14. 03.2. 03.0 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	1 Laporan	N/A			1 Laporan	198.475.000
2.14. 03.2. 03.0 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	575 Orang	1.832.485.900			600 Orang	1.832.457.200

2.14. 03.2. 03.0 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	20 Unit	974.490.000	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-REGULER-KB		20 Unit	970.000.000
2.14. 03.2. 03.0 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		1 Laporan	124.050.000			1 Laporan	124.050.000
<b>2.14. 03.2. 04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan</b>	<b>Presentase kampung KB yang aktif</b>	<b>Presentase kampung KB yang aktif</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>70%</b>	<b>224.250.000,00</b>			<b>70%</b>	<b>224.250.000,00</b>

	<b>Kesertaan Ber-KB</b>									
2.14. 03.2. 04.0 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kota Batam	13 Kampung KB	224.250.000			13 Kampung KB	224.250.000
<b>02.1 4.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif</b>	<b>Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>50%</b>	<b>5.379.445.000,00</b>			<b>55%</b>	<b>5.438.523.000,00</b>

2.14. 04.2. 01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina</b>	<b>Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>5.379.445.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>5.438.523.000,00</b>
2.14. 04.2. 01.0 2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		N/A	N/A			N/A	N/A
2.14. 04.2. 01.0 3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Kota Batam	2 Laporan	150.025.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		2 Laporan	209.103.000

	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		350 Orang	5.229.420.000			400 Orang	5.229.420.000
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	N/A	N/A	Kota Batam	350 Kelompok	N/A			N/A	N/A

	(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)									
<b>TOTAL</b>			<b>23.334.047.091,00</b>				<b>24.948.642.344,00</b>			

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diwujudkan melalui 10 (Sepuluh) program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Pengendalian Penduduk

Namun demikian, dari sepuluh program tersebut terdapat 1 (satu) program yang merupakan program rutin Setiap OPD, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sehingga yang menjadi program inti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ada 9 (Sembilan) yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga



2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Program Pengendalian Penduduk

Program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, yang dilaksanakan dalam satu kegiatan yaitu :
  - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan satu sub kegiatan, yaitu:
    - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang dilaksanakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu:
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu:
  - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Perlindungan Perempuan
  - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Perlindungan Khusus Anak
  - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
    - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
    - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
    - Pengendalian Program KKBPK
  - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
  - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
  - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
    - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya
    - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
    - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
    - Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Program Pengendalian Penduduk
  - b. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- c. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu program yang mendukung isu strategis pembangunan kota Batam periode 2021-2026 terkait penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan yang memegang peran penting dalam upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam meningkatkan perekonomian dan kapasitas SDM perempuan kota Batam.

Demikian halnya melalui Program Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berupaya memperbaiki taraf hidup keluarga yang masih rendah dan memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat, Meningkatkan kualitas dan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta KB, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi yang merata, Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, Meningkatkan kampanye pendewasaan usia perkawinan, menyediakan data primer tahapan keluarga di Kota Batam.

Tabel: 4.1.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023:**

Program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan dalam bentuk beberapa indikator kegiatan yang tertera pada Tabel 4.1, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (2023 Tahun Rencana)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>02.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Teenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>9.262.774.740,00</b>		
<b>2.08.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang teenuhi</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>7.994.697.780,00</b>		
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	39 Orang	7.950.057.780	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	7 Dokumen	44.640.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
<b>2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang teenuhi</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>259.515.000,00</b>		

2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	11.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	19.997.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	20.384.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	12.195.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	11 Laporan	149.979.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
<b>2.08.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>186.489.000,00</b>		
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	5 Unit	186.489.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>647.442.960,00</b>		
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	80.420.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A		N/A	N/A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Laporan	567.022.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH	

<b>2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>174.630.000,00</b>		
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	79.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	5 Unit	75.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	60 Unit	20.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A		N/A	N/A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
<b>02.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>11,30</b>	<b>70.000.000,00</b>		
<b>2 08 02 2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang dibina dan berhasil</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>70%</b>	<b>70.000.000,00</b>		
2 08 02 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	35 Dokumen	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	



02.08.02	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Kota Batam	65%	1.147.655.000,00		
2.08.02.2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase perempuan yang dibina	Kota Batam	65%	1.147.655.000,00		
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Dokumen	1.147.655.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
02.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Kota Batam	100%	410.980.101,00		
2.08.03.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kota Batam	40%	310.000.100,00		
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	59 Dokumen	310.000.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH	

<b>2.08.03.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>30%</b>	<b>100.980.001,00</b>		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	18 Layanan	100.980.001	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
<b>2.08.03.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>N/A</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>		
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		N/A	N/A		
<b>02.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>4,25%</b>	<b>1.584.598.750,00</b>		
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>65%</b>	<b>1.584.598.750,00</b>		

2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	1.584.598.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
	Kegiatan PKK Kota Batam - Pembinaan Akhlak Mulia -						
<b>02.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>65%</b>	<b>74.994.500,00</b>		
<b>2,08.05.2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>65%</b>	<b>74.994.500,00</b>		
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	44 Dokumen	74.994.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
<b>02.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>780 Skor</b>	<b>420.000.000,00</b>		
<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>66%</b>	<b>420.000.000,00</b>		

2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	420.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
<b>02.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>350.094.200,00</b>		
<b>2.08.07.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti / yang dilayani)</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>75%</b>	<b>112.949.600,00</b>		
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	90 Dokumen	112.949.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>65%</b>	<b>161.064.000,00</b>		
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	59 Layanan	161.064.000		
<b>2.08.07.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti</b>		<b>65%</b>	<b>76.080.600,00</b>		

2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		59 SDM	76.080.600		
<b>02.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>30%</b>	<b>187.600.000,00</b>		
<b>2.14.02.2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>30%</b>	<b>70.000.000,00</b>		
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>		<b>100%/40%</b>	<b>117.600.000,00</b>		
2.14.02.2.02.03	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		12 Dokumen	117.600.000		
<b>02.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>81.0%/9.50</b>	<b>4.445.904.800,00</b>		

<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standar pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%/40%</b>	<b>838.455.000,00</b>		
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Loka	Kota Batam	4 Dokumen	108.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			N/A	N/A	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Kota Batam	1 Laporan	N/A	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	1 Laporan	486.000.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		1 Laporan	244.455.000		
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase tenaga lini/kader yang aktif</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>70%</b>	<b>452.173.900,00</b>		

2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	6 Organisasi	44.999.900		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	532 Orang	407.174.000		
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>82%</b>	<b>2.931.025.900,00</b>		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	1 Laporan	N/A		
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	575 Orang	1.832.485.900		
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	20 Unit	974.490.000	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-REGULER-KB	

2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		1 Laporan	124.050.000		
<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Presentase kampung KB yang aktif</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>70%</b>	<b>224.250.000,00</b>		
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kota Batam	13 Kampung KB	224.250.000		
<b>02.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>50%</b>	<b>5.379.445.000,00</b>		
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>5.379.445.000,00</b>		
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		N/A	N/A		



2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam	2 Laporan	150.025.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		350 Orang	5.229.420.000		
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	N/A	Kota Batam	350 Kelompok	N/A		
<b>TOTAL</b>				<b>23.334.047.091,00</b>			

### **Sumber Dana**

Adapun sumber dana dari keseluruhan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjalankan program dan kegiatan bersumber dari dana APBD Kota Batam. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 10 (sepuluh) program yang telah dispesifikasi yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Pengendalian Penduduk

Dengan pelaksanaan kesepuluh program ini, maka diharapkan dapat terpenuhi pendanaan dari APBD Kota Batam.

Demikian secara keseluruhan perolehan dana yang diharapkan untuk dapat mencapai kinerja yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

## BAB V PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023 ini diharapkan akan memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan **"Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri"** serta sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam periode Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini selayaknya dievaluasi maupun monitor secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan dapat dilakukan perbaikan – perbaikan seperlunya, sehingga secara umum dapat selaras dengan visi Kota Batam untuk dapat **"Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera."**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Batam

  
Umiyati, S.E  
 NIP. 19621027 198503 2 006



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KOTA BATAM**

Jalan Raja Isa No.17 Gedung Bersama Lt.III Batam Center; Telp/Fax. (0778) 470692 Batam  
Email: bppakbbatam@gmail.com

Kode Pos: 29464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**

**Nomor: 034/RP.01.01/XII/2021**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM**  
**TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2016-2021, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam,

Pada tanggal 31 Desember 2021



**KOPALA DINAS**

**UMIYATI, S.E**

NIP. 19621027 198503 2 006



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DP3APPKB KOTA BATAM  
TAHUN 2022**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM  
TAHUN 2022**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM		
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	PENGARAH		
2	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	PENANGGUNGJAWAB		
3	KASUBBAG. PERENCANAAN PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	SEKRETARIS		
I.	<b>PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ROYHANDY RIFANTO, S.Kom	19840830 201001 1 003	Kabid. PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinator
2	FERA DARMAYANTI, S.IP	19870211 201101 2 004	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
3	NURUL YUNI, S.H	19740626 200212 2 005	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
4	Dra. TUTI ARYANTI	19740704 200003 2 004	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga	Anggota

II.	<b>PEMENUHAN HAK ANAK</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	RAFEAH, S.Sos	19730115 200003 2 001	Kabid. Pemenuhan Hak Anak	Koordinator
2	SRI YANTI, S.E, M.Si	19750210 200003 2 006	Kasi PHA di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	Anggota
3	SRI RAHMI FITRIANTY, S.E	19691210 200212 2 008	Kasi PHA di Bidang Pengasuhan, Alternatif Pendidikan dan Budaya	Anggota
4	ULFI RAMAYANTI, S.ST	19680611 198801 2 003	Kasi PHA di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Anggota
III.	<b>PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	FISCA ANGGIANA, S.E	19710714 200003 2 007	Kabid. Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	Koordinator
2	DEDY SURYADI, AKS, M.H	19670929 198803 1 009	Kasi Pencegahan & Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	Anggota
3	HASRIATI, S.E	19741027 200901 2 004	Kasi Data, Informasi, Perempuan dan Anak	Anggota

4	TEDDY SUHANDI, S.IP	19810610 200801 1 011	Kasi Perlindungan Anak	Anggota
IV.	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	MUTIARA AYU, S.IP	19870814 200701 2 002	Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Ir. INDAWATY WAKIDJO	19671102 199403 2 005	Kasi Advokasi, Informasi, Edukasi dan Pengendalian Penduduk	Anggota
3	LIBERTY LUCI PATIMANG, S.KM	19711216 199803 2 008	Kasi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
4	EVI MURNI	19640515 198503 2 015	Kasi Pendistribusian Kebutuhan Alat, Obat Kontrasepsi	Anggota
IV.	<b>KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	dr. DEWI MURNI	19751225 200604 2 029	Kabid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Koordinator
2	TIAMAN SITORUS, S.E	19650822 198602 2 006	Kasi Bina Ketahanan & Pemberdayaan Keluarga	Anggota
3	ISNAINI, S.Ag	19660319 199803 2 002	Kasi Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	Anggota
4	IWAN KRISTIANTO, S.Psi	19780423 200604 1 010	Kasi Data dan Informasi Kependudukan KB & Pembangunan Keluarga	Anggota

Batam, 01 Desember 2021



**UMIYATI, S.E**

NIP. 19621027 198503 2 006